



RENCANA KERJA
ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
(RENJA-OPD) T.A. 2024

BIRO ORGANISASI
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT
2023



DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i	
BAB I	PENDAHULUAN	1
	A. Latar Belakang	1
	B. Landasan Hukum	1
	C. Maksud dan Tujuan	3
	D. Sistematika Penulisan	4
BAB II	EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA BIRO ORGANISASI TAHUN 2022	5
	A. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2022 dan Capaian Renstra Biro Organisasi	5
	B. Analisis Pelayanan Kinerja Biro Organisasi	17
	C. Isu-Isu Penting Peyelenggaraan Tugas dan Fungsi Biro Organisasi	22
	D. Review Terhadap Rencana Kerja Pemerintah Daerah	23
	E. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	33
BAB III	TUJUAN DAN SASARAN	
	A. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional	34
	B. Tujuan dan sasaran Rencana Kerja Biro Organisasi	34
	C. Program dan Kegiatan	35
BAB IV	RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	37
BAB V	PENUTUP	47



BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Berdasarkan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Prov. Kalbar Tahun 2024-2026, yang dimaksudkan untuk memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai pedoman dan tolak ukur kinerja dalam pelaksanaan pembangunan di bidang penataan organisasi yang telah diselaraskan dengan arah kebijakan dan program pembangunan daerah. Untuk itu, Biro Organisasi Setda Prov. Kalbar telah menetapkan Rencana Kerja (Renja) Tahun Anggaran 2024 sebagai dasar acuan pelaksanaan program dan kegiatan prioritas serta sebagai pedoman dan pengendalian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan Biro Organisasi dalam pencapaian visi dan misi serta tujuan organisasi.

Rencana Kerja mempunyai fungsi penting dalam sistem perencanaan daerah, karena Rencana Kerja menerjemahkan perencanaan strategis jangka menengah (RPD dan Renstra SKPD) ke dalam rencana, program, dan penganggaran tahunan, Rencana Kerja menjembatani sinkronisasi, harmonisasi Rencana Strategis ke dalam langkah-langkah tahunan yang lebih konkrit dan terukur. Dengan demikian Rencana Kerja merupakan pedoman bagi penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), dimana kebijakan umum APBD ditetapkan secara bersama-sama antara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dengan Pemerintah. Dengan cakupan dan cara penetapan tersebut, Rencana Kerja mempunyai fungsi pokok dan menjadi acuan bagi seluruh pelaku pembangunan karena memuat seluruh kebijakan publik.

B. LANDASAN HUKUM

Landasan hukum yang digunakan dalam penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Biro Organisasi Setda Prov. Kalbar Tahun 2024, adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik



5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dan yang terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
10. Peraturan Pemerintah No 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
12. Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
13. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan



Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

15. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 9 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2005 Nomor 9);
16. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah provinsi Kalimantan Barat Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 3);
17. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 6);
18. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Prov. Kalbar Tahun 2018-2023;
19. Peraturan Gubernur Nomor 110 Tahun 2021 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta tata kerja Sekretariat Provinsi Kalimantan Barat (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2021 Nomor 110).

C. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud penyusunan Rencana Kerja Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat mempunyai maksud:

1. Menjadi pedoman dalam melaksanakan program/kegiatan selama 1 tahun dan sebagai penjabaran dari Renstra Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat.
2. Menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran serta Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Biro Organisasi Provinsi Kalimantan Barat.

Sedangkan tujuan dari penyusunan Rencana Kerja Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat adalah:

1. Menciptakan kepastian dan sinergitas perencanaan program kegiatan, perumusan kebijakan teknis; penyelenggaraan urusan pemerintah dan pelayanan publik, pengawasan, pengendalian serta evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan bidang pemerintahan dan pelayanan publik serta penguatan lembaga Biro Organisasi Sekretariat Daerah Prov. Kalbar.
2. Mengarahkan program dan kegiatan Biro Organisasi Sekretariat Daerah Prov. Kalbar selama 1 tahun dengan mengacu pada Renstra dan RPJMD Provinsi Kalimantan Barat.



D. SISTEMATIKA PENULISAN

Penulisan Rencana Kerja (Renja) Biro Organisasi Setda Provinsi Kalimantan Barat mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 86 b

BAB I PENDAHULUAN

Menjelaskan mengenai gambaran umum penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dapat dipahami dengan baik yang terdiri dari latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, serta sistematik penulisan.

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA BIRO ORGANISASI TAHUN 2022

Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu dan perkiraan capaian Renstra Perangkat Daerah, analisis kinerja, pelayanan perangkat daerah, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah, review terhadap rancangan awal RKPD serta penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat.

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PROGRAM DAN KEGIATAN

Memuat telahaan terhadap kebijakan nasional, tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah, serta Program Kerja dan Kegiatan Perangkat Daerah.

BAB IV ROGRAM DAN KEGIATAN

Memuat Rencana Kerja dan besaran anggaran sesuai dengan pagu indikatif tahun 2024

BAB V PENUTUP

Bab ini berisi catatan penting yang perlu mendapat perhatian, kaidah-kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut.



BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA BIRO ORGANISASI TAHUN 2022

A. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2022 DAN CAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH

Pada Tahun 2022, Biro Organisasi Setda Provinsi Kalimantan Barat mendapat alokasi anggaran sebesar Rp. 2.911.172.956,00 dengan realisasi sebesar Rp. 2.871.324.770,00 atau 98,63%. Anggaran tersebut merupakan anggaran Belanja Langsung, sedangkan untuk Belanja Tidak Langsung dilingkungan Sekretariat Daerah dialokasikan terpusat pada Biro Umum Setda Provinsi Kalimantan Barat. Untuk Tahun 2022, pada Biro Organisasi Setda Provinsi Kalbar terdapat 2 (dua) program dan 9 (sembilan) kegiatan.

Adapun evaluasi hasil pelaksanaan Renja Biro Organisasi Setda Prov. Kalbar dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022 dapat dilihat sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi

Program ini ditetapkan dengan maksud agar dapat tercapai tujuan organisasi dalam hal menunjang urusan Biro Organisasi Setda Prov. Kalbar dalam satu tahun anggaran melalui beberapa kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

- 1.01. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;
- 1.02. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah;
- 1.03. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah;
- 1.05. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah;
- 1.06. Administrasi Umum Perangkat Daerah;
- 1.08. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
- 1.09. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.

2. Program Penataan Organisasi

Program ini terdiri dari 2 (dua) kegiatan, yaitu:

- 1.01. Fasilitasi Kelembagaan dan Analisis Jabatan;
- 1.02. Fasilitasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja;

Berikut ini ditampilkan perbandingan Realisasi Capaian Indikator Kinerja Utama selama Tahun 2022-2024:



Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan
Pencapaian Renstra Perangkat Daerah Tahun 2022 s/d 2024
Biro Organisasi Setda Provinsi Kalimantan Barat

Kode	Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2022	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja dan Program dan Kegiatan Tahun 2023			Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024	
					Target Renja Perangkat Daerah	Realisasi Renja Perangkat Daerah	Tingkat Realisasi (%)	Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2024
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI								
	1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran, dan pelaporan yang disusun tepat waktu	100%	100%	100%			100%	
	a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan kinerja yang disusun	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen			1 dokumen	
	b. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah RKA-SKPD yang tersusun	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen			1 dokumen	
	c. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah RKA-SKPD perubahan yang tersusun	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen			1 dokumen	
	d. Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah DPA-SKPD yang tersusun	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen			1 dokumen	
	e. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah DPA-SKPD perubahan yang tersusun	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen			1 dokumen	
	f. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen LAKIP dan TAPKIN yang tersusun	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen			2 Laporan	



	b. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah laporan barang cetakan dan penggandaan yang diverifikasi	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	2 Paket		
	c. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah jenis barang bacaan dan peraturan Perundang-undangan	480 eksemplar	480 eksemplar	480 eksemplar	480 eksemplar	480 eksemplar	2 Dokumen		
	d. Penyediaan Bahan/Material	Jumlah paket bahan material	1 paket	1 paket	1 paket	1 paket	1 paket	1 Paket		
	e. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan kegiatan koordinasi dan konsultasi ke luar daerah dan dalam daerah	19 laporan	19 laporan	19 laporan	19 laporan	19 laporan	19 laporan		
	f. Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah dokumen penatausahaan arsip dinamis pada SKPD						3 Dokumen		
	g. Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah paket jasa untuk mendukung pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik	8 unit	8 unit	8 unit	8 unit	1 Dokumen	1 Dokumen		
	6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah						100%		
	a. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan						12 Laporan		
	7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD dalam kondisi baik	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
	a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terpelihara dan pajaknya terbayarkan	4 unit	4 unit	4 unit	4 unit	2 unit	2 unit		
	b. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah kendaraan dinas, AC, laptop, Lainnya	78 unit	78 unit	78 unit	78 unit	111 unit	111 unit		



	perangkat daerah Prov. Kalbar	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan				
	5) Jumlah laporan penyusunan budaya kerja provinsi Kalimantan barat	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan			-	
	6) Jumlah Laporan Coaching Clinic ASN BerAKHLAK	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan				
	7) Jumlah Laporan Deklarasi ASN BerAKHLAK	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan				
	8) Jumlah Laporan Pembinaan Budaya Kerja Provinsi dan Kabupaten/Kota	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan				
	9) Jumlah Peserta yang mengikuti Birttek	120 Anggota	0							
	10) Jumlah Laporan penyusunan budaya kerja Pemprov Kalbar	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan			1 Laporan	
	11) Jumlah Laporan Aktivasi dan Peningkatan kompetensi Agen Perubahan Budaya Kerja							1 Laporan		1 Laporan
	12) Laporan Pembinaan dan Partisipasi dalam pengisian pengukuran Index Budaya Kerja Berakhlak, employer engagement dan employer branding 2023									1 Laporan
	13) Laporan Sosialisasi system pengelolaan SDM kepada seluruh ASN dan sosialisasi hasil pengukuran baseline pemetaan budaya							1 Laporan		1 Laporan



		34 Inovasi	145 Inovasi	40 Inovasi	86 Inovasi			
e. Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Publik	1) Jumlah inovasi pelayanan publik Prov. Kalbar	8 Kab/ Kota	14	6 Kab/Kota				
	2) Jumlah Kab/Kota yang dilakukan pembinaan dan pengawasan pelayanan publik melalui kunjungan langsung	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan				
	3) Jumlah laporan survei kepuasan masyarakat	46 PD/Biro	45 PD/Biro	46 PD/Biro				
	4) Jumlah PD/Biro yang dimonitoring dan dievaluasi	1 Kebijakan	0	1 Kebijakan				
	5) Jumlah Kebijakan Pelayanan Publik	100 Orang	105 Orang	100 Orang				
	6) Jumlah peserta bimtek survei kepuasan masyarakat	100 Orang	0	100 Orang				
	7) Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi kebijakan penyelenggaraan pelayanan publik							
	8) Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Publik			1 Dokumen	1 Dokumen			



B. ANALISIS PELAYANAN KINERJA BIRO ORGANISASI

Analisis kinerja pelayanan Biro Organisasi berdasarkan hasil kinerja dapat dilakukan evaluasi terhadap keberhasilan atau kegagalan dalam pencapaian sasaran berikut indikatornya sebagai berikut:



TABEL 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Biro Organisasi Setda
Provinsi Kalimantan Barat

No	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah						Realisasi Capaian				PROYEKSI 2024	Catatan Analisis
				2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023			
1	2	3	4	5	6	7	8		9	10	11			13	
	Persentase perangkat daerah yang tepat fungsi tepat ukuran selaras dengan kinerjanya			51%					57%						
	1. Jumlah Perangkat Daerah yang ditata			19 PD					19 PD						
	Persentase Kelembagaan provinsi yang efektif dan efisien sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan daerah				100%	100%	100%			100%	100%				
1	1. Jumlah perangkat daerah yang dilakukan penataan sesuai peraturan perundang-undangan				5 PD	2 PD	2 PD			47 PD	2 PD				
	2. persentase dokumen manajemen SDMA PD yang terverifikasi				100%	100%	100%			327%	118%				
	3. persentase kabupaten/kota yang difasilitasi penataan kelembagaan sesuai peraturan perundang-undangan				100%	100%	100%			100%	100%				



Nilai SAKIP Komponen Pelaporan Kinerja																			
1.	Persentase LKj PD yang memuat informasi kinerja				11,5	12	12,5	11,5	11,5	100%	100%	11,5	10,76	100%	100%				



C. ISU-ISU PENTING PEYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI BIRO ORGANISASI

Faktor-faktor penghambat yang mempengaruhi pelayanan SKPD terkait dengan tugas dan fungsi Biro Organisasi sebagai berikut :

- a. Masih adanya revisi berbagai Peraturan Perundang-undangan di bidang organisasi.
- b. Belum adanya Peraturan Gubernur tentang penggunaan pakaian dinas lapangan di Perangkat Daerah yang melayani langsung ke masyarakat.
- c. Belum semua Perangkat Daerah baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota yang melaporkan hasil Survei Kepuasan Masyarakat.
- d. Belum adanya sinkronisasi di bidang ketatalaksanaan dalam pengimplementasian Peraturan, antara Kementerian PAN & RB serta Kementerian Dalam Negeri.
- e. Masih rendahnya pemahaman aparatur dalam penyusunan SOP.
- f. Masih terdapat penyajian analisis program/kegiatan dalam pencapaian keberhasilan atau kegagalan yang belum dijabarkan secara komprehensif.
- g. Masih rendahnya kepatuhan perangkat daerah dalam penyampaian Laporan Kinerja sesuai dengan batas waktu yang ditetapkan, sehingga menjadi kendala dalam penyelesaian penyusunan Laporan Kinerja (LKj) Provinsi Kalbar.

Hal-hal yang dilakukan untuk memecahkan permasalahan atau kendala tersebut, antara lain:

- a. Melakukan koordinasi dengan Pemerintah Pusat.
- b. Melakukan koordinasi dengan Perangkat Daerah terkait agar membuat segera membuat Peraturan Gubernur tentang Pakaian Dinas dimaksud.
- c. Menetapkan kebijakan terkait pelaksanaan SKM di daerah sehingga mengikat semua unit pelayanan dalam melaksanakan SKM.
- d. Melakukan pembinaan terhadap Pemerintah Kabupaten/kota melalui kegiatan sosialisasi dibidang ketatalaksanaan.
- e. Perlu diadakan sosialisasi atau in house training oleh masing-masing Perangkat Daerah.
- f. Memberikan pemahaman kepada seluruh Perangkat Daerah untuk membuat analisis pencapaian keberhasilan atau kegagalan dalam pencapaian kinerja.
- g. Memberikan peringatan kepada Perangkat Daerah yang menyampaian Laporan Kinerja (LKj) melampaui batas waktu yang ditentukan.

Isu-isu penting dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi yang dihadapi di dalam melaksanakan keseluruhan program dan kegiatan Biro Organisasi adalah sebagai berikut :

1. Penataan organisasi perangkat daerah yang efisien, efektif dan proporsional berdasarkan kewenangan karakteristik dan potensi daerah.
2. Perubahan dan perkembangan kebijakan aparatur.
3. Terwujudnya Reformasi Birokrasi dilingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat.
4. Perlunya peningkatan kemampuan Pegawai dalam melaksanakan fungsi dan tugas pokok.



D. REVIEW TERHADAP RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

Rencana Kerja Biro Organisasi Setda Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2022 mengalami perubahan kegiatan dan program dari tahun-tahun sebelumnya. Khususnya penambahan pada kegiatan Budaya Kerja, Kegiatan dan program tersebut diselenggarakan dalam rangka menunjang tugas pokok dan fungsi Biro Organisasi Setda Provinsi Kalimantan Barat.

Perencanaan program dan kegiatan tahun 2022 dibuat sesuai dengan pagu indikatif yang ditetapkan oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang akan ditetapkan dengan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat.

Secara keseluruhan, hasil telaahan terhadap Rancangan Awal RKPD dapat dilihat pada table 2.3.



TABEL. 2.3
REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2022
BIRO ORGANISASI SETDA PROV. KALBAR

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Ctt Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				943.222.196	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				943.222.196	
	1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Pontianak	Persentase dokumen perencanaan, dan pelaporan yang disusun tepat waktu	n/a	120.137.250	1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Pontianak	Persentase dokumen perencanaan, dan pelaporan yang disusun tepat waktu	n/a	120.137.250	
	a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Daerah	Pontianak	Jumlah dokumen perencanaan kinerja yang disusun	1 dokumen	25.756.700	a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Daerah	Pontianak	Jumlah dokumen perencanaan kinerja yang disusun	1 dokumen	25.756.700	
	b. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Pontianak	Jumlah RKA-SKPD yang tersusun	1 dokumen	25.776.800	b. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Pontianak	Jumlah RKA-SKPD yang tersusun	1 dokumen	25.776.800	
	c. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Pontianak	Jumlah RKA-SKPD perubahan yang tersusun	1 dokumen	5.745.004	c. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Pontianak	Jumlah RKA-SKPD perubahan yang tersusun	1 dokumen	5.745.004	
	d. Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Pontianak	Jumlah DPA-SKPD yang tersusun	1 dokumen	5.846.246	d. Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Pontianak	Jumlah DPA-SKPD yang tersusun	1 dokumen	5.846.246	
	e. Koordinasi dan Perubahan DPA-SKPD	Pontianak	Jumlah DPA-SKPD perubahan yang tersusun	1 dokumen	24.632.700	e. Koordinasi dan Perubahan DPA-SKPD	Pontianak	Jumlah DPA-SKPD perubahan yang tersusun	1 dokumen	24.632.700	
	f. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Pontianak	Jumlah dokumen LAKIP dan TAPKIN yang tersusun	2 dokumen	19.336.400	f. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Pontianak	Jumlah dokumen LAKIP dan TAPKIN yang tersusun	2 dokumen	19.336.400	



5. Administrasi Umum Perangkat Daerah	Pontianak	Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana tugas sesuai standar	100%	458.357.426	5. Administrasi Umum Perangkat Daerah	Pontianak	Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana tugas sesuai standar	100%	458.357.426
a. Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Pontianak	Jumlah makanan dan minuman rapat yang terverifikasi	1400 porsi	48.000.000	a. Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Pontianak	Jumlah makanan dan minuman rapat yang terverifikasi	1400 porsi	48.000.000
b. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Pontianak	Jumlah laporan barang cetakan dan penggandaan yang diverifikasi	1 laporan	6.949.500	b. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Pontianak	Jumlah laporan barang cetakan dan penggandaan yang diverifikasi	1 laporan	6.949.500
c. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Pontianak	Jumlah jenis barang bacaan dan peraturan Perundang-undangan	-	-	c. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Pontianak	Jumlah jenis barang bacaan dan peraturan Perundang-undangan	-	-
d. Penyediaan Bahan/Material	Pontianak	Jumlah paket bahan material	1 paket	25.000.000	d. Penyediaan Bahan/Material	Pontianak	Jumlah paket bahan material	1 paket	25.000.000
e. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Pontianak	Jumlah laporan kegiatan koordinasi dan konsultasi ke luar daerah dan dalam daerah	19 laporan	318.407.926	e. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Pontianak	Jumlah laporan kegiatan koordinasi dan konsultasi ke luar daerah dan dalam daerah	19 laporan	318.407.926
f. Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Pontianak	1) Jumlah paket jasa untuk mendukung pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik 2) Jumlah unit untuk mendukung pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik	1 paket	60.000.000	f. Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Pontianak	1) Jumlah paket jasa untuk mendukung pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik 2) Jumlah unit untuk mendukung pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik	1 paket	60.000.000
6. Penyediaan Jasa Penunjang Pemerintahan Daerah	Pontianak	Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana tugas sesuai standar	100%	15.180.000	6. Penyediaan Jasa Penunjang Pemerintahan Daerah	Pontianak	Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana tugas sesuai standar	100%	15.180.000
a. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Pontianak	Jumlah laporan layanan internet pada biro yang terverifikasi	12 laporan	15.180.000	a. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Pontianak	Jumlah laporan layanan internet pada biro yang terverifikasi	12 laporan	15.180.000



	7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pontianak	Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana tugas sesuai standar	100%	81.410.000	7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pontianak	Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana tugas sesuai standar	100%	81.410.000
	a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Pontianak	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terpelihara dan pajaknya terbayarkan	4 unit	2.000.000	a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Pontianak	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terpelihara dan pajaknya terbayarkan	4 unit	2.000.000
	b. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pontianak	Jumlah kendaraan dinas, AC, laptop, PC, dan printer yang terpelihara	78 unit	79.410.000	b. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pontianak	Jumlah kendaraan dinas, AC, laptop, PC, dan printer yang terpelihara	78 unit	79.410.000
II	PROGRAM PENATAAN ORGANISASI				2.229.954.600	PROGRAM PENATAAN ORGANISASI				2.229.954.600
	1. Fasilitasi Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Pontianak	1) Persentase Perangkat Daerah dengan nilai IKM sangat baik 2) Jumlah Perangkat Daerah yang selaras dengan kinerjanya 3) Persentase Kab/Kota yang difasilitasi penataan kelembagaan sesuai peraturan Perundang-undangan	0 0 0	688.388.952	1. Fasilitasi Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Pontianak	1) Persentase Perangkat Daerah dengan nilai IKM sangat baik 2) Jumlah Perangkat Daerah yang selaras dengan kinerjanya 3) Persentase Kab/Kota yang difasilitasi penataan kelembagaan sesuai peraturan Perundang-undangan	0 0 0	688.388.952
			4) Persentase Perangkat Daerah yang melaksanakan RB	0				4) Persentase Perangkat Daerah yang melaksanakan RB	0	
			5) Persentase Kab/Kota dengan nilai RB yang meningkat	0				5) Persentase Kab/Kota dengan nilai RB yang meningkat	0	



				0				0	
a. Fasilitas Penataan Kelembagaan Provinsi	Pontianak	6) Persentase LKj Pemprov yang memuat informasi kinerja 1) Jumlah data kelembagaan Perangkat Daerah Provinsi dan Kab/Kota yang terupdate	230.501.952	1 data	a. Fasilitas Penataan Kelembagaan Provinsi	Pontianak	6) Persentase LKj Pemprov yang memuat informasi kinerja 1) Jumlah data kelembagaan Perangkat Daerah Provinsi dan Kab/Kota yang terupdate	1 data	230.501.952
		2) Jumlah Pergub Tupoksi Perangkat Daerah Prov. Kalbar yang disusun		5 rapergub			2) Jumlah Pergub Tupoksi Perangkat Daerah Prov. Kalbar yang disusun	5 rapergub	
		3) Jumlah Raperda Perangkat Daerah yang disusun		1 raperda			3) Jumlah Raperda Perangkat Daerah yang disusun	1 raperda	
		4) Jumlah UPT yang dilakukan penataan		2 rapergub UPT			4) Jumlah UPT yang dilakukan penataan	2 rapergub UPT	
b. Fasilitas Penataan Kelembagaan Kabupaten/Kota	Pontianak	1) Jumlah dokumen/laporan kesepakatan forsesdasi	277.073.000	1 dokumen	b. Fasilitas Penataan Kelembagaan Kabupaten/Kota	Pontianak	1) Jumlah dokumen/laporan kesepakatan forsesdasi	1 dokumen	277.073.000
		2) Jumlah Kab/Kota yang dilakukan pembinaan perangkat daerah		14 Kab/Kota			2) Jumlah Kab/Kota yang dilakukan pembinaan perangkat daerah	14 Kab/Kota	
		3) Jumlah Kab/Kota yang dilakukan pengendalian penataan perangkat daerah		14 Kab/Kota			3) Jumlah Kab/Kota yang dilakukan pengendalian penataan perangkat daerah	14 Kab/Kota	
		4) Jumlah peserta yang akan mengikuti rakortek bidang organisasi se-Kalbar		80 peserta			4) Jumlah peserta yang akan mengikuti rakortek bidang organisasi se-Kalbar	80 peserta	
c. Penataan Analisis Jabatan	Pontianak	1) Dokumen peta jabatan penyederhanaan birokrasi yang tersusun	180.814.000	1 dokumen	c. Penataan Analisis Jabatan	Pontianak	1) Dokumen peta jabatan penyederhanaan birokrasi yang tersusun	1 dokumen	180.814.000
		2) Jumlah dokumen Anjab/ABK Kab/Kota yang tervalidasi		1 dokumen			2) Jumlah dokumen Anjab/ABK Kab/Kota yang tervalidasi	1 dokumen	
		3) Jumlah dokumen Anjab dan ABK		8 dokumen			3) Jumlah dokumen Anjab dan ABK	8 dokumen	



E. PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT

Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat terkait dengan Tugas Pokok dan Fungsi Biro Organisasi selama ini tidak ada.



BAB III TUJUAN DAN SASARAN

A. TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL

RKPD Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2024 disusun dalam rangka untuk menjaga konsistensi antara program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah berdasarkan Rencana Strategis Perangkat Daerah dengan kebijakan pada RPJMD Perubahan Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2024-2026.

Ada 7 (tujuh) fokus yang menjadi program prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2024, yaitu:

- 1). Meningkatkan Derajat Kesejahteraan Masyarakat.
- 2). Meningkatkan kecerdasan Sumber Daya Manusia.
- 3). Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat.
- 4). Meningkatkan Kapasitas Sumber Daya Aparatur, Manajemen Pemerintahan dan Pelayanan Publik.
- 5). Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Dasar.
- 6). Meningkatkan Kemampuan Pembiayaan Pembangunan.
- 7). Meningkatkan Pemerataan Pembangunan, Keadilan, Aman, Damai serta Ketahanan Budaya.

B. TUJUAN DAN SASARAN RENJA BIRO ORGANISASI

1. Tujuan

Tujuan merupakan sesuatu (apa) yang akan dicapai atau dihasilkan pada kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun ke depan, ditetapkan dengan mengacu pada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisis strategis. Selain itu tujuan tidak harus dinyatakan dalam bentuk *kuantitatif*, akan tetapi harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai di masa mendatang. Diharapkan tujuan akan mengarahkan perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan (LAN-RI, 2003:9).

Penetapan tujuan didasarkan pada faktor kunci keberhasilan (analisis SWOT: *Strengths, Weakness, Opportunities, Threats*) yang dilakukan setelah penetapan visi dan misi Biro Organisasi. Tujuan organisasi dilaksanakan secara konsisten dengan tugas pokok dan fungsi Biro Organisasi berdasarkan prinsip kolektifitas, disertai menggambarkan arah strategi instansi dan tujuan yang ingin dicapai sesuai dengan tugas pokok dan fungsi. Dengan demikian tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi instansi Pemerintah yang ditetapkan dengan memperhatikan faktor-faktor penentu keberhasilan (*key success factor*) dari hasil analisis yang memadai terhadap lingkungan baik internal maupun global.

Untuk itu telah ditetapkan 4 (empat) tujuan strategis, yaitu :

1. Terwujudnya Efektivitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah.

2. Sasaran

Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi Pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Selain itu dalam sasaran, dirancang pula indikator sasaran yaitu ukuran tingkat keberhasilan pencapaian sasaran untuk diwujudkan pada tahun bersangkutan, dimana pada setiap indikator



sasaran selalu disertai dengan rencana tingkat capaiannya (target) masing-masing.

Dengan demikian sasaran strategis merupakan sesuatu yang akan dicapai dalam jangka waktu 1 (satu) tahun yang berfokus pada tindakan dan alokasi sumber daya organisasi dalam kegiatan atau operasional organisasi. Untuk itu Biro Organisasi telah menetapkan 5 (lima) sasaran, sebagai berikut:

1. Meningkatnya kelembagaan provinsi yang efektif dan efisien sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan daerah.
2. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik di Provinsi Kalimantan Barat.
3. Meningkatnya pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada Perangkat Daerah Provinsi dan Kabupaten/ Kota.
4. Meningkatnya kualitas Laporan Kinerja (LKj) Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat.

C. PROGRAM DAN KEGIATAN

Program dan kegiatan yang akan direncanakan untuk tahun 2023 pada Biro Organisasi Setda Prov. Kalbar terdiri dari:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi
 - a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - 1) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - 2) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
 - 3) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
 - 4) Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
 - 5) Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD
 - 6) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
 - 7) Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - 1) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD
 - c. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
 - 1) Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD
 - 2) Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
 - d. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - 1) Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
 - 2) Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
 - 3) Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian
 - 4) Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai
 - e. Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - 1) Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - 2) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - 3) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
 - 4) Penyediaan Bahan/Material
 - 5) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
-



- 6) Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
- 7) Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD
- f. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - 1) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum
- g. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - 1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - 2) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
2. Program Penataan Organisasi
 - a. Fasilitasi Kelembagaan dan Analisis Jabatan
 - 1) Fasilitasi Penataan Kelembagaan Provinsi
 - 2) Fasilitasi Penataan Kelembagaan Kabupaten/Kota
 - 3) Penataan Analisis Jabatan
 - b. Fasilitasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja
 - 1) Pembinaan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi
 - 2) Monitoring dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja
 - 3) Evaluasi Pelaksanaan Budaya Kerja
 - 4) Pengelolaan Tatalaksana Pemerintahan
 - 5) Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Publik

Rumusan rencana Program dan kegiatan Biro Organisasi Setda Prov. Kalbar tahun 2023 dan prakiraan maju tahun 2024 dituangkan dalam tabel berikut :



BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Penyusunan rencana Program dan Kegiatan tahun 2024 yang dituangkan dalam Rencana Kerja (Renja) disinkronkan dengan Rencana Strategis (Renstra) Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat tahun 2024-2026, dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2018-2023 sebagai penjabaran dari Visi dan Misi Gubernur terpilih.

Rencana program dan kegiatan, Indikator kinerja, kelompok sasaran, lokasi kegiatan, kebutuhan dana indikatif dan sumber dana dapat dilihat pada daftar lampiran Rencana Kerja (RENJA) ini.

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENCANA KERJA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN		PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS NASIONAL	DAERAH	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
1	2	3	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.01.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	7.005.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Memperkuat transformasi pelayanan publik	Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat	14	15	10.000.000,00	BIRO ORGANISASI SETDA PROVINSI KALIMANTAN BARAT		
	4.01.01.1.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	7.028.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Memperkuat transformasi pelayanan publik	Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat	14	15	10.000.000,00	BIRO ORGANISASI SETDA PROVINSI KALIMANTAN BARAT		
	4.01.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ihtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ihtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	5.833.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Memperkuat transformasi pelayanan publik	Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat	14	15	10.000.000,00	BIRO ORGANISASI SETDA PROVINSI KALIMANTAN BARAT		
	4.01.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Laporan	5.863.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Memperkuat transformasi pelayanan publik	Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat	14	15	10.000.000,00	BIRO ORGANISASI SETDA PROVINSI KALIMANTAN BARAT		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / SUB KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE PERSTRATA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN			PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS NASIONAL	DAERAH	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)			
1	4.01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase laporan keuangan yang disusun tepat waktu	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	BIRO ORGANISASI SETDA PROVINSI KALIMANTAN BARAT
	4.01.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	-	-	-	100 %	27.646.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Memperkuat transformasi pelayanan publik	Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat	15	40.000.000,00	BIRO ORGANISASI SETDA PROVINSI KALIMANTAN BARAT	
	4.01.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Pengelolaan Barang Milik Daerah	-	-	-	100 %	31.082.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Memperkuat transformasi pelayanan publik	Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat	-	50.000.000,00	BIRO ORGANISASI SETDA PROVINSI KALIMANTAN BARAT	
	4.01.01.1.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	-	-	-	5 Laporan	6.770.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Memperkuat transformasi pelayanan publik	Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat	-	10.000.000,00	BIRO ORGANISASI SETDA PROVINSI KALIMANTAN BARAT	
	4.01.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	-	-	-	12 Laporan	22.322.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Memperkuat transformasi pelayanan publik	Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat	-	40.000.000,00	BIRO ORGANISASI SETDA PROVINSI KALIMANTAN BARAT	
	4.01.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian sesuai prosedur	-	-	-	100 %	15.949.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Memperkuat transformasi pelayanan publik	Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat	-	20.000.000,00	BIRO ORGANISASI SETDA PROVINSI KALIMANTAN BARAT	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				PRORITAS		KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	NASIONAL	DAERAH		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD			1 Dokumen	43.778.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Memperkuat transformasi pelayanan publik	Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat	15	30.000.000,00	BIRO ORGANISASI SETDA PROVINSI KALIMANTAN BARAT	
4.01.01.1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	-		100 %	71.706.160,00				Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Memperkuat transformasi pelayanan publik	Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat	-	0,00	BIRO ORGANISASI SETDA PROVINSI KALIMANTAN BARAT
4.01.01.1.08.0004		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan			12 Laporan	71.706.160,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Memperkuat transformasi pelayanan publik	Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat		0,00	BIRO ORGANISASI SETDA PROVINSI KALIMANTAN BARAT	
4.01.01.1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah dalam kondisi baik	-		100 %	118.050.000,00				Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Memperkuat transformasi pelayanan publik	Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat	-	125.000.000,00	BIRO ORGANISASI SETDA PROVINSI KALIMANTAN BARAT
4.01.01.1.09.0002		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Periznannya			2 Unit	3.600.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Memperkuat transformasi pelayanan publik	Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat		5.000.000,00	BIRO ORGANISASI SETDA PROVINSI KALIMANTAN BARAT	
4.01.01.1.09.0006		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara			104 Unit	114.450.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Memperkuat transformasi pelayanan publik	Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat		120.000.000,00	BIRO ORGANISASI SETDA PROVINSI KALIMANTAN BARAT	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENCANA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENCANA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025			PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB			
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS DAERAH	KELOMPOK SASARAN		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	4.01.02	PROGRAM PENATAAN ORGANISASI	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
2.	4.01.02		<p>Persentase Perangkat Daerah Provinsi dengan nilai Reformasi Birokrasi/ 60 ke atas</p> <p>Persentase LK/ PD yang memuat informasi kinerja</p> <p>Persentase Kabupaten/Kota dengan nilai Reformasi Birokrasi/ 60 ke atas</p> <p>Persentase Perangkat Daerah dengan nilai IKM sangat baik</p> <p>Jumlah Kelembagaan yang dilakukannya penataan sesuai dengan dokumen SDMA (PD, UPT, Rekom Provinsi dan Kab/Kota)</p>				<p>100 %</p> <p>100 %</p> <p>100 %</p> <p>31 %</p> <p>6 Kabupaten/Kota</p>	1.809.076.410,00								1.800.000.000,00	
	4.01.02.1.01	Facilitasi Kelembagaan dan Analisis Jabatan	<p>Jumlah dokumen SDMA yang terverifikasi Kelembagaan Provinsi yang tepat fungsi dan tepat ukuran sesuai dokumen SDMA</p> <p>Jumlah rekomendasi Kebijakan bidang Kelembagaan bagi kabupaten/kota</p>				<p>3 Dokumen</p> <p>3 Dokumen</p> <p>3 Dokumen</p>	502.310.000,00				<p>Memperkuat Stabilitas Perekonomian dan Daya Saing Pelayanan Publik</p>	<p>Memperkuat transformasi pelayanan publik</p>	<p>Perangkat Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota Se Kalimantan Barat</p>		600.000.000,00	<p>BIRO ORGANISASI SETDA PROVINSI KALIMANTAN BARAT</p>
	4.01.02.1.01.0001	Facilitasi Penataan Kelembagaan Provinsi	<p>Jumlah Dokumen Hasil Penataan Kelembagaan Kabupaten/Kota</p>				1 Dokumen	156.012.900,00	<p>Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa</p>	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	<p>Memperkuat Stabilitas Perekonomian dan Daya Saing Pelayanan Publik</p>	<p>Memperkuat transformasi pelayanan publik</p>	<p>Perangkat Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota Se Kalimantan Barat</p>		200.000.000,00	<p>BIRO ORGANISASI SETDA PROVINSI KALIMANTAN BARAT</p>	
	4.01.02.1.01.0002	Facilitasi Penataan Kelembagaan Kabupaten/Kota	<p>Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Penataan Kelembagaan Kabupaten/Kota</p>				1 Dokumen	184.921.100,00	<p>Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa</p>	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	<p>Memperkuat Stabilitas Perekonomian dan Daya Saing Pelayanan Publik</p>	<p>Memperkuat transformasi pelayanan publik</p>	<p>Perangkat Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota Se Kalimantan Barat</p>		200.000.000,00	<p>BIRO ORGANISASI SETDA PROVINSI KALIMANTAN BARAT</p>	
	4.01.02.1.01.0003	Penataan Analisis Jabatan	<p>Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Analisis Jabatan, Analisis Bidang Kerja, dan Evaluasi Jabatan</p>				3 Dokumen	161.376.000,00	<p>Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa</p>	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	<p>Memperkuat Stabilitas Perekonomian dan Daya Saing Pelayanan Publik</p>	<p>Memperkuat transformasi pelayanan publik</p>	<p>Perangkat Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota Se Kalimantan Barat</p>		200.000.000,00	<p>BIRO ORGANISASI SETDA PROVINSI KALIMANTAN BARAT</p>	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / SUB PROGRAM / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENSTRA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJUA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PEMANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	NASIONAL	DAERAH		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas/Peningkatan Pelayanan Publik	1 Dokumen	286.392.400,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER LUMJUM-DANA ALOKASI LUMJUM	Memperkuat Stabilitas Perekonomian Dan Transformasi Pelayanan Publik	Memperkuat Transformasi Pelayanan Publik	Perangkat Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota Se Kalimantan Barat		300.000.000,00				BIRO ORGANISASI SETDA PROVINSI KALIMANTAN BARAT
J U M L A H														2.390.000.000,00		




BAB V PENUTUP

Rencana Kerja Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2024 disusun berdasarkan pagu indikatif yang disesuaikan dengan kebutuhan dan Skala Prioritas Program dan Kegiatan. Rencana Kerja yang disusun ini terdiri dari 2 (dua) program, 9 (sembilan) kegiatan, dan 32 (tiga puluh dua) sub kegiatan. Program, kegiatan, dan sub kegiatan tersebut bersifat rutin/penunjang serta program dan kegiatan yang sifatnya prioritas. Program dan kegiatan rutin/penunjang ada 1 (satu) program dengan 7 (tujuh) kegiatan dan 24 (dua puluh empat) sub kegiatan, sedangkan program dan kegiatan prioritas ada 1 (satu) program dengan 2 (dua) kegiatan dan 8 (delapan) sub kegiatan.

Untuk mendukung seluruh program, kegiatan dan sub kegiatan tersebut diperlukan anggaran sebesar Rp.2.000.000.000,00 (Dua Milyar Rupiah) yang sumber pembiayaannya berasal dari APBD Provinsi Kalimantan Barat.

Rencana Kerja yang disusun ini masih perlu banyak penyempurnaan baik kegiatan-kegiatan maupun besaran pagu indikatifnya guna menjamin konsistensi antara perencanaan dan penganggaran. Dengan demikian diharapkan Rencana Kerja yang disusun dapat mencapai sasaran-sasaran pembangunan sesuai dengan prioritas yang ditetapkan.

Agustus 2023
Kepala Biro Organisasi,

Muhammad Abdullah, S.IP, M.Si
Manajemen Utama Muda/(IV/c)
NIP. 19660211 198603 2 007